

Bertahan Melewati Krisis: Etnis Tionghoa Pasca Kerusuhan 23 Mei 1997 di Banjarmasin

Willy Alfarius, Rahayu, Rusdi Effendi, Daud Yahya, Heri Susanto, Helmi Akmal

Universitas Lambung Mangkurat
alfarius@ulm.ac.id

Article History

accepted 1/12/2025

approved 2/1/2026

published 23/1/2026

Abstract

The May 23, 1997 Incident in Banjarmasin, South Kalimantan were major riots triggered by disputes during the 1997 Election campaign and escalated into racial issues with ethnic Chinese as the target of violence amid the economic and political crisis towards the end of the New Order. This study aims to explain the process of survival and rebuilding the lives of the Chinese ethnic group after the riots. Until now, studies on the May 23, 1997 Incident have been limited to the course of the riots. The long-term impacts, including the trauma that plagues riot victims years after the event, have been rarely studied. The historical method was used with sources in the form of contemporary newspapers, research reports, and interviews with historical witnesses, using a social history approach. The results of the study show that despite experiencing massive attacks and having to flee, and even facing another crisis on May 21, 1998, the Chinese ethnic group, as a minority group, was able to survive the crisis. The study concludes that the Chinese ethnic group succeeded in restoring their socio-economic life to what it was before the crisis, although some did not return to Banjarmasin.

Keywords: ethnic Tionghoa, May 23, 1997 incident, survivors, Banjarmasin

Abstrak

Peristiwa 23 Mei 1997 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan merupakan kerusuhan besar yang dipicu pertikaian kampanye Pemilu 1997 dan meluas menjadi isu rasial dengan etnis Tionghoa sebagai sasaran kekerasan di tengah krisis ekonomi dan politik jelang akhir Orde Baru. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses bertahan dan membangun kembali kehidupan etnis Tionghoa pasca kerusuhan tersebut. Selama ini, kajian mengenai Peristiwa 23 Mei 1997 terbatas pada jalannya peristiwa kerusuhan saja. Dampak panjang, termasuk trauma yang menyertai korban kerusuhan bertahun-tahun setelah peristiwa, masih sangat jarang diteliti. Metode sejarah digunakan dengan sumber berupa surat kabar sezaman, laporan penelitian, dan wawancara saksi sejarah, menggunakan pendekatan sejarah sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mengalami serangan masif dan harus mengungsi, bahkan menghadapi krisis berikutnya pada 21 Mei 1998, etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas mampu bertahan melewati masa-masa krisis. Penelitian menyimpulkan bahwa etnis Tionghoa berhasil memulihkan kembali kehidupan sosial ekonominya seperti sebelum krisis, meskipun sebagian tidak kembali ke Banjarmasin.

Kata kunci: etnis Tionghoa, Peristiwa 23 Mei 1997, penyintas, Banjarmasin



PENDAHULUAN

Jelang akhir pemerintahan rezim Orde Baru pada 1998, situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia berada dalam situasi menuju krisis. Krisis moneter hebat menerjang Indonesia, setidaknya sejak sekitar 1997 atau setahun sebelum Reformasi (Cribb & Kahin, 2012). Berbagai macam demonstrasi, baik yang berakhir damai maupun berujung kerusuhan kerap terjadi dalam tahun-tahun ini. Krisis moneter dan inflasi, diikuti dengan krisis kepercayaan terhadap rezim Suharto yang telah berkuasa selama tiga dekade, menjadi bahan bakar yang semakin menyulut amarah Masyarakat (Baswir, 2006). Polarisasi di antara masyarakat mulai terjadi, amarah mudah tersulut, terutama di tengah berbagai macam krisis ekonomi dan politik yang sedang melanda. Kerusuhan menjadi sesuatu yang lazim terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, atau juga kota kabupaten kecil lainnya di berbagai titik seperti di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

Tidak hanya di ibukota Jakarta saja, situasi krisis ini menyebar ke seantero Indonesia, hingga menyebabkan letusan-letusan amarah tidak terbendung lagi (Kusumabrata, 2024). Sebuah kerusuhan terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, persisnya dalam masa kampanye partai politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 yang menjadi pemilu terakhir di masa Orde Baru. Massa kampanye Golkar terlibat bentrokan dengan kelompok masyarakat, yang kemudian menyebabkan kerusuhan berskala besar yang melanda satu kota. Terjadi kekerasan dalam skala masif yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (Soenarto, 2008).

Selain itu, permukiman, tempat ibadah, pertokoan, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga kendaraan menjadi sasaran pembakaran. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai "Peristiwa Jumat Kelabu" atau juga "Peristiwa 23 Mei 1997". Meski bermula dari massa kampanye, kerusuhan meluas menjadi isu rasial dan agama. Kompleks pertokoan dan pusat perbelanjaan menjadi arena penjarahan. Berbagai tempat ibadah menjadi sasaran amarah massa. Perkampungan etnis minoritas, dalam hal ini kelompok Tionghoa, juga tidak luput dari amukan dan perusakan. Puncaknya, kejadian ini menewaskan 100-an jiwa yang terperangkap dan terpanggang dalam kobaran api di sebuah pusat perbelanjaan (Ricklefs, 2022).

Kerusuhan dalam lingkup kota, yang biasanya diiringi dengan tindakan penjarahan, kerap menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kelompok Tionghoa kerap dijadikan kambing hitam sekaligus target kemarahan atas segala krisis, ketimpangan, dan kekacauan ekonomi-politik yang terjadi. Misalnya saja sepanjang Revolusi Indonesia 1945-1949, etnis Tionghoa di berbagai kota, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, dijadikan sasaran persekusi yang dilakukan dengan amat brutal hingga memakan ribuan korban jiwa (Setiono, 2008). Peristiwa yang kurang lebih serupa berulang kembali ketika Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 terjadi. Etnis Tionghoa banyak yang dianggap dekat atau bahkan tergabung dengan PKI yang dituduh sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Republik Rakyat Tiongkok, yang menjadi tanah leluhur mereka juga dijadikan alasan bahwa Tionghoa Indonesia merupakan kelompok komunis, sehingga tak pelak lagi kemudian mereka turut menjadi korban kekerasan sepanjang 1965-1966 (Robinson, 2018). Berbagai macam kerusuhan yang kemudian membawa kekerasan pada etnis Tionghoa terus menerus terjadi, baik di masa Sukarno maupun Suharto (Zhou, 2019). Sepanjang Orde Baru, orang Tionghoa dilarang menampilkan segala macam bentuk tradisi dan kebudayaan mereka di ruang publik, termasuk acara peringatan hingga huruf mandarin (Suryadinata, 1976). Tidak terkecuali dalam Peristiwa 23 Mei 1997 yang dalam beberapa hal juga turut membawa isu rasial berupa kebencian terhadap etnis Tionghoa dalam terjadinya kerusuhan.

Tulisan ini menguraikan proses kelompok etnis Tionghoa bertahan dalam situasi krisis dan kekacauan yang terjadi dalam Peristiwa 23 Mei 1997. Secara lebih

spesifik, artikel ini menjelaskan cara kelompok Tionghoa sebagai etnis minoritas bertahan, melawan trauma, dan membangun kembali kehidupan mereka pasca kerusuhan. Artikel ini berangkat dari setidaknya tiga pertanyaan utama: apa yang terjadi pada etnis Tionghoa di Banjarmasin saat Peristiwa 23 Mei 1997 terjadi? Mengapa orang-orang Tionghoa turut menjadi sasaran amukan massa? Bagaimana dan sejauh mana etnis Tionghoa dapat bertahan dan melalui masa krisis dan trauma pasca kerusuhan terjadi?

Di tengah ketidakstabilan ekonomi di akhir masa pemerintahan Orde Baru, tentu menjadi hal yang genting bagi etnis Tionghoa yang selama ini kerap menjadi sasaran amarah atas krisis yang terjadi, terutama karena posisi mereka sebagai *middle-man* dalam sistem perekonomian Indonesia. Secara lebih spesifik, tulisan ini juga menjelaskan proses komunitas Tionghoa melalui periode pasca krisis selama tahun-tahun pertama pasca kerusuhan, terutama dikaitkan dengan berbagai macam pergolakan sosial politik yang terjadi pada periode pergantian rezim dari Orde Baru ke Reformasi pada 1998. Dalam historiografi Indonesia, artikel ini berusaha mengisi kekosongan mengenai dampak dan pemulihan penyintas dalam Peristiwa 23 Mei 1997 yang selama ini masih belum banyak ditulis dan diteliti.

METODE

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 1995) untuk merekonstruksi proses etnis Tionghoa dalam melewati masa krisis pasca kerusuhan besar yang terjadi pada 23 Mei 1997 di Kota Banjarmasin. Setelah melalui pemilihan topik, penelitian dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber sejarah yang menjadi basis dari rekonstruksi sejarah. Sumber utama yang digunakan dalam tulisan ini antara lain surat kabar sezaman yang mewartakan terjadinya peristiwa tersebut seperti *Dinamika Berita* dan *Banjarmasin Post*. Selain itu sumber lisan, yakni para saksi sezaman yang melihat dan mengalami langsung juga turut menjadi sumber utama dalam tulisan ini. Terutama sekali, kesaksian dari orang-orang Tionghoa itu sendiri yang menyaksikan dan mengalami secara langsung Peristiwa 23 Mei 1997 dan dampak yang terjadi kemudian menjadi sumber utama dalam tulisan ini. Selain sumber primer sezaman, beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya juga turut dijadikan rujukan sebagai sumber sekunder.

Temuan sumber ini lantas diverifikasi melalui kritik internal maupun eksternal, terutama terkait isi dan substansi sumber, material sumber, hingga periode sumber-sumber tersebut diproduksi. Sedangkan sumber lisan terutama dipilih berdasarkan mereka yang menjadi pelaku sejarah sezaman maupun saksi sejarah yang mengalami dan melihat langsung saat Peristiwa 23 Mei 1997 terjadi. Berbagai informasi yang diperoleh dari sumber ini kemudian direkonstruksi dan disusun sedemikian rupa menjadi tulisan ini. Tulisan ini sendiri menggunakan pendekatan sejarah sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo, sejarah sosial merupakan pendekatan yang mengambil fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian. Fakta sosial tersebut dapat berupa kemiskinan, perbanditan, kriminalitas, kekerasan, dan masih banyak lagi (Kuntowijoyo, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusahan Jelang Pemilahan Umum 1997

Pada masa kampanye jelang Pemilu 1997, pecah sebuah kerusuhan besar yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada 23 Mei 1997, massa pendukung Golkar melakukan konvoi keliling Kota Banjarmasin sebagai bagian dari kampanye hari terakhir sebelum hari pemilihan dilaksanakan enam hari kemudian. Sejak dua hari sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga melaksanakan kampanye, masing-masing pada 21 dan 22

Mei 1997. Model kampanye ketiga kontestan pemilu tersebut kurang lebih serupa. Massa pendukung melakukan konvoi keliling kota menggunakan sepeda motor yang biasanya akan dikendarai sedemikian rupa guna menarik perhatian masyarakat umum. Sepanjang jalan, mereka akan berpawai sembari meneriakkan yel-yel dukungan pada partai mereka (Salim & Achdian, 1997).

Hanya saja, tensi politik sudah mulai panas sejak dua partai sebelumnya melakukan kampanye putaran terakhirnya. Pada saat PDI melakukan kampanye, satu sepeda motor terbakar. Beberapa peserta kampanye melakukan perusakan terhadap berbagai atribut organisasi politik lainnya yang mereka temui sepanjang jalan konvoi. Di jalan, massa juga tidak segan-segan menyerang pengguna jalan lainnya yang dianggap menganggu atau menghalangi melintasnya massa pawai kampanye. Terlihat arogansi yang kemudian membuat setiap kampanye yang dilakukan memiliki tensi yang cukup panas.

Hal serupa juga dilakukan massa pendukung PPP dalam kampanye sehari berikutnya. Tindakan yang cukup arogan seperti merusak atribut kampanye lawan politik juga mereka lakukan. Bahkan saat melintas kantor DPD Golkar, massa juga melakukan pelemparan batu. Rumah-rumah penduduk yang didapati terpasang atribut kampanye partai politik lain juga tidak luput dari aksi-aksi pelemparan batu. Aksi kampanye yang berlangsung hingga malam hari ini relatif masih dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Ringkasnya, hari-hari menjelang Jumat Kelabu memang sudah cukup menegangkan, menurus ke arah kerusuhan (Salim & Achdian, 1997).

Secara umum, hari-hari sepanjang masa kampanya menjelang Pemilu 1997 memang cukup tegang dan berlangsung dalam tensi tinggi. Tidak hanya di Banjarmasin, kampanye di berbagai kota lainnya di Indonesia mengalami hal yang serupa, terutama di Jakarta. Surat kabar melaporkan berbagai macam kerusuhan dan kekerasan terjadi di antara masa pendukung yang kemudian menyebabkan pecahnya bentrokan maupun tawuran. Editorial Kompas mencatat bahwa kampanye jelang Pemilu 1997 dapat disebut cenderung brutal, sehingga aparat keamanan dari berbagai kesatuan sampai harus dikerahkan guna mengamankan jalannya kampanye yang nyaris selalu berakhiran ricuh (Kampanye Pemilu '97 Cenderung Brutal, 1997).

Tensi panas ini berpuncak pada hari terakhir pelaksanaan kampanye yakni pada Jumat, 23 Mei 1997, jelang hari pencoblosan pemilihan umum yang kurang dari seminggu lagi. Hari itu Golkar dijadwalkan berkampanye di Kota Banjarmasin dengan titik pusat berada di Taman Kamboja, yang secara administratif berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Acara kampanye ini direncanakan akan berjalan meriah, termasuk dengan mengundang selebritis ibukota yang didatangkan untuk meramaikan kegiatan. Massa kampanye Golkar semenjak pagi hari sudah melakukan konvoi keliling kota, mengitari jalan-jalan protokol guna menarik simpati dan perhatian massa pada umumnya. Sepanjang konvoi ini, beberapa kali terjadi gesekan kecil antara massa kampanye dengan warga, misalnya di Masjid Agung Miftahul Ikhwan di Jalan Kolonel, di depan Mitra Plaza, hingga di ujung Jalan Pangeran Samudra.

Di titik inilah awal mula kerusuhan besar terjadi. Pada saat jamaah masjid sedang menunaikan salat Jumat di Masjid Noor yang terletak di Jalan Pangeran Samudra, massa konvoi yang melintas justru menarik dan memainkan tuas gas sepeda motor yang mereka kendalai. Otomatis suara bising dan memekakan telinga muncul dari knalpot sepeda motor mereka sehingga dianggap menganggu jalannya ibadah. Jamaah yang terganggu dengan kebisingan tersebut kemudian merespons dengan mengejar dan menangkap massa konvoi tersebut. Kemarahan jamaah tidak berhenti di sini dan sebatas pada mereka yang menganggu jalannya ibadah. Selepas itu, massa yang lebih besar kemudian melakukan pengejaran dan razia (*sweeping*) terhadap massa kampanye Golkar (Khotimah, 2017). Dari sudut pandang teori solidaritas, aksi kekerasan ini muncul sebagai akibat dari kondisi yang memaksa

massa untuk melakukan pembelaan identitas secara kolektif ketika muncul tekanan bahkan kekerasan dari kelompok lain yang dominan atau pengontrol (Oberschall, 1978).

Merujuk pada teori deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr, apabila terjadi kesenjangan antara ekspektasi yang diharapkan dengan kapasitas atau nilai yang dimiliki, maka kekerasan dan kerusuhan menjadi suatu keniscayaan yang akan terjadi dalam suatu kelompok masyarakat maupun individu. Semakin besar ketidakpuasan yang dialami, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya tindak kekerasan (Gurr, 2016). Begitu pula yang terjadi di Banjarmasin ketika dalam kondisi ekonomi yang menuju krisis pada 1997, massa terpancing dengan perilaku peserta kampanye dari entitas politik yang hingga saat itu menjadi penguasa pemerintahan. Di tengah situasi yang mulai sulit secara ekonomi, adanya tindakan-tindakan yang dapat memancing amarah massa tentu saja membuat aksi kekerasan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Apalagi dengan kondisi bahwa mereka yang dianggap sebagai penyulut kemarahan berasal dari kelompok yang sedang dominan atau berkuasa.

Kemarahan yang dipantik oleh beberapa anggota massa kampanye ini berubah menjadi amarah yang meluas kepada seluruh peserta kampanye Golkar. Siapapun yang mengenakan atribut Golkar yang identik dengan warna kuning tersebut diminta untuk melepaskannya. Dengan berbekal senjata tajam, kelompok yang marah ini kemudian melakukan tindakan represif terhadap para peserta kampanye. Setelah mengejar dan menyerang massa kampanye, kelompok yang marah ini kemudian melakukan penyerangan terhadap bangunan pertokoan, perkantoran, hingga rumah ibadah. Kampanye urung terlaksana karena situasi benar-benar tidak kondusif dan tidak terkendali seiring eskalasi kerusuhan yang semakin membesar.

Sejak siang itu, Banjarmasin benar-benar luluh lantak oleh kerusuhan. Suasana mencekam meliputi seantero kota yang lumpuh oleh karena bentrokan antar kelompok pendukung partai politik ini. Data resmi mencatat bahwa 123 orang tewas menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari segi material, satu buah gereja musnah dan 10 lainnya rusak berat. Kerusakan berat lainnya terjadi pada rumah (151 buah), toko (144), pusat perbelanjaan (3), swalayan (3), bank (5), kantor pemerintahan (4), hiburan (1), sekolah (3), panti jompo (1), dan apotik (1). Termasuk pula 36 mobil dan 34 sepeda motor musnah dibakar dalam kerusuhan ini (Salim & Achdian, 1997). Kerusuhan baru mereda dan kota relatif terkendali setelah satuan Brimob dari Kalimantan Timur didatangkan ke Banjarmasin.

Statistik di atas menunjukkan bagaimana skala dan insensitas kerusuhan terjadi dengan begitu masif sehingga jatuh korban jiwa dalam jumlah yang amat besar serta akibat kerusakan material yang ditimbulkan. Pada dasarnya, kerusuhan ini dapat disebut sebagai puncak eskalasi dari panasnya situasi kampanye partai politik di Banjarmasin sejak beberapa hari sebelum Peristiwa Jumat Kelabu ini akhirnya pecah. Laporan-laporan dari Dinamika Berita menunjukkan bagaimana kampanye PDI dan PPP yang berlangsung pada har-hari tersebut sudah diwarnai oleh berbagai insiden, terutama pada 21-22 Mei 1997. Misalnya saja, sebuah sepeda motor milik simpatisan PDI terbakar di depan Plaza Junjung Buih, Banjarmasin. Sementara itu, arak-arakan puluhan ribu massa PPP berhenti di depan kantor DPD Golkar dan sempat melempari markas rival mereka tersebut dengan batu. Banyak juga rumah-rumah penduduk yang terkena lemparan batu, bahkan terjadi pula penurunan atribut parpol lain yang menjadi lawan politik mereka (PDI dan PPP Habis-habisan: Lempari Rumah, Turunkan Atribut OPP Lain, 1997).

Selain itu, dampak psikologis juga tidak kalah menakutkan. Pasca kerusuhan terjadi, jam malam diterapkan di Banjarmasin guna mencegah potensi kerusuhan atau kejadian-kejadian lanjutan dari peristiwa tersebut (Pedagang Blauran Tidak Bisa Gelar

Dagangan, 1997). Penerapan jam malam ini tentu saja disebabkan alasan keamanan mengingat potensi terjadinya kerusuhan lanjutan masih dapat saja terjadinya. Misalnya saja, beberapa hari setelah kerusuhan, sempat muncul selebaran gelap yang seolahxxx. Jelasnya, pasca kerusuhan aktivitas ekonomi lesu. Penumpang angkutan umum dilaporkan anjlok drastis hingga 50 persen, imbas dari sepinya orang yang bepergian karena situasi yang masih mencekam (Penumpang Taksi Kota di Banjarmasin Anjlok sampai 50 Persen, 1997).

Ketakutan maupun kerugian secara ekonomi ini juga menimpa etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok minoritas yang ada di Banjarmasin. Kendati awal permasalahan yang terjadi tidak terkait sama sekali dengan mereka, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan mereka juga menjadi terancam ketika kerusuhan meledak. Sebagian besar dari mereka adalah para pemilik toko yang habis dijarah dalam rangkaian kerusuhan Jumat Kelabu tersebut. Kekerasan yang menyasar pada kelompok Tionghoa Indonesia ini bukanlah hal baru ataupun terjadi di sedikit tempat saja. Jemma Purdey mencatat bahwa pada tahun-tahun jelang keruntuhan Orde Baru, kerusuhan dan kekerasan anti-Tionghoa terjadi di banyak tempat di Indonesia (Purdey, 2006).

Pasca Pemilu 1997, kekerasan makin meningkat, meski sejatinya tidak ada alasan yang logis dan jelas mengapa kekerasan terhadap etnis Tionghoa tersebut harus dilakukan. Yang jelas, krisis ekonomi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok naik serta gelombang pemutusan hubungan kerja yang meningkat menjadikan banyak masyarakat yang mengalami depresi dan frustrasi pada tekanan hidup yang mereka alami. Sementara itu, posisi orang Tionghoa yang selalu menjadi middle-man, hidup dalam kelompoknya sendiri sehingga sering dicap ekslusif, serta taraf ekonomi yang dianggap lebih baik dan dianakemaskan, menjadikan sentimen anti-Tionghoa tidak pernah lekang dari pandangan kebanyakan orang (Purdey, 2006). Pandangan yang tentu saja menjadi stigma tersebut seperti menunggu bom waktu untuk kemudian meledak kapanpun dengan sedikit pemicu saja.

Etnis Tionghoa di Tengah Ancaman Kekerasan

Dalam Peristiwa 23 Mei, selain kekerasan berupa perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan, terjadi pula penjarahan terhadap toko-toko yang ada di beberapa titik perniagaan di Kota Banjarmasin. Selama ini pusat perniagaan banyak dimiliki oleh para pengusaha yang berasal dari etnis Tionghoa, terutama kompleks pertokoan dan perdagangan yang berada di pusat kota dan di sepanjang jalan-jalan protokol yang ada di Kota Banjarmasin seperti misal di Pasar Baru, Pasar Sudimampir, Jalan M.T. Haryono, Jalan Pangeran Samudera, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Hasanuddin (Salim & Achdian, 1997). Selebihnya adalah para pengusaha dari kelompok etnis lainnya seperti Banjar, Dayak, Jawa, Madura, dsb.

Ketika kerusuhan 23 Mei 1997 pecah, penjarahan terhadap pertokoan milik orang-orang Tionghoa terjadi. Massa dalam jumlah besar dengan leluasa mengambil apapun yang dapat mereka angkat dari pertokoan maupun pusat perbelanjaan. Umumnya, peralatan elektronik kerap menjadi incaran para penjarah oleh karena harganya yang relatif mahal ketimbang komoditas barang lainnya. Dalam situasi seperti ini, aparat keamanan nyaris tidak berkutik dengan jumlah massa yang amat besar dan dibalut amarah. Penjarahan menjadi sesuatu yang tidak dapat dicegah lagi. Laporan YLBHI Jakarta yang menyelidiki peristiwa ini menyebutkan bahwa sejak pawai keliling untuk kampanye, massa sudah sering melempari dengan batu kompleks pertokoan milik orang-orang Tionghoa (Salim & Achdian, 1997). Artinya, aksi-aksi kekerasan kecil ini ibarat api dalam sekam yang menunggu momentum untuk terbakar dengan besar.

Seperti yang disebutkan di atas, aksi kekerasan terhadap orang Tionghoa terutama disebabkan oleh stigma yang telah lama melekat pada mereka. Sebagai etnis pedagang yang sejak masa kolonial diberikan status sebagai perantara bagi perniagaan berbagai komoditas, mereka dianggap sebagai kelompok yang memonopoli perdagangan serta berkoalisi dengan penjajah. Di sisi lain, status mereka yang merupakan perantau atau keturunan dari para pendatang di masa lalu menambah sentimen anti asing dalam diri mereka yang menyebut sebagai masyarakat pribumi. Kekerasan ini bahkan berlangsung sejak masa VOC, ketika kongsi dagang tersebut membantai setidaknya 10.000 orang Tionghoa dibantai pada 1740 di Batavia (Ravando, 2014). Artinya, sepanjang setidaknya tiga abad sejak masa VOC hadir di Nusantara, kekerasan terhadap orang Tionghoa bukanlah hal baru. Aksi pengusiran, penjarahan, bahkan hingga pembunuhan massal terjadi dalam beberapa turbulensi politik penting sepanjang Indonesia kolonial maupun merdeka, mulai dari periode Jepang, Revolusi, Demokrasi Terpimpin, 1965-1966, hingga akhir Orde Baru.

Maka kemudian, apa yang terjadi di Banjarmasin dalam rangkaian Peristiwa 23 Mei 1997 merupakan kelanjutan dari aksi-aksi kekerasan anti Tionghoa yang lazim terjadi di Indonesia. Jerry Nata (Ong Kwan Nin), salah seorang Tionghoa yang menjadi saksi mata dari kerusuhan tersebut berkisah bahwa sepanjang hari itu, ia mendapatkan banyak panggilan telepon. Ia dimintai bantuan untuk menyelamatkan banyak anggota keluarga Tionghoa yang masih terjebak di area sekitar kerusuhan terjadi. Orang-orang yang berasal dari kalangan Tionghoa ini banyak yang memilih tetap berada di dalam gedung tempat mereka bekerja, baik itu pertokoan maupun perkantoran, karena tidak ada jaminan keselamatan apabila mereka berani keluar area dan berjalan pulang (Nata, 2024).

Saksi mata lainnya, Sugiharto Hendrata menuturkan bahwa ia melihat sendiri dari kejauhan proses saat Mitra Plaza dijarah oleh massa. Ia menuturkan:

"Dari kejauhan saya melihat dimana pada saat itu api berkobar di arah Mitra Plaza. Pada kejadian ramai orang-orang yang menggunakan kendaraan, sepeda maupun gerobak-gerobak berlalu lalang mengangkut barang-barang dari hasil jaraian."

Dalam situasi yang sedang mencekam, berbagai kendaraan mulai dari mobil, sepeda, hingga gerobak berlalu-lalang mengangkut barang-barang hasil jaraian yang mereka ambil dari dalam Mitra Plaza. Tempat inilah yang kemudian menjadi titik paling mencekam dengan jatuhnya ratusan korban jiwa yang terjebak dan hangus terbakar di dalam mal tersebut. Selain penjarahan, Sugiharto menuturkan bahwa pembakaran terhadap permukiman orang-orang Tionghoa juga terjadi, tepatnya di kawasan yang berada di belakang Gedung Wisma Kartika Antasari (Hendrata, 2024).

Mitra Plaza sendiri adalah pusat perbelanjaan modern pertama yang dibangun dan dibuka di Banjarmasin, persisnya pada 1990. Salah satu pengusaha yang terlibat dalam pembangunannya adalah Johny Kim, seorang Tionghoa Banjarmasin yang dikenal sebagai pebisnis ulung (Firly, 2023). Mitra Plaza menjadi mal primadona di seantero Kalimantan Selatan, bahkan hingga Kalimantan Tengah. Namun, pecahnya kerusuhan hingga penjarahan pada 23 Mei 1997 meluluhlantakkan pusat perbelanjaan ini. Di tempat ini pula seratusan orang tewas terpanggang dalam sebuah kebakaran.

Tidak hanya pusat perbelanjaan yang banyak dimiliki orang Tionghoa, tempat ibadah mereka juga tidak luput dari sasaran amukan kemarahan massa yang amat beringas. Sarwa Dharma (Phang Suy In) yang menjadi saksi mata mengisahkan bahwa Kelenteng Suci Nurani menjadi sasaran amukan massa. Ia menuturkan:

"Peristiwa kerusuhan ini berdampak terjadi pembakaran terhadap kantor saja sehingga anak, adik serta paman mengalami rasa ketakutan. Akan tetapi tidak ada korban jiwa dari keluarga saya karena sempat menyelamatkan diri dari

kobaran api melalui Speed Boat yang saya kirimkan. Untuk yang lain hanya kerugian atas terbakarnya barang-barang aja di kantor”.

Saat itu patung yang berada di kelenteng yang berada di tepian Sungai Martapura tersebut dibakar oleh massa. Melihat situasi ini, warga kawasan Pecinan kemudian mencegah agar massa jangan sampai turut merusak atau membakar bangunan kelenteng (Dharma, 2019). Meski aksi pembakaran yang lebih luas urung terjadi, tentu saja ini menjadi pukulan mental yang cukup telak yang membuat warga Tionghoa menyimpan rasa trauma yang mendalam terhadap peristiwa ini.

Menariknya, Kota Banjarmasin secara umum tidak memiliki riwayat kekerasan maupun persekusi terhadap kelompok minoritas, baik itu berbasiskan agama maupun etnis. Kota ini dikenal sebagai kota yang toleran, terutama dalam statusnya sebagai ibukota provinsi yang mana menjadi tujuan pendatang dari berbagai tempat dan latar belakang. Berbagai kelompok etnis maupun agama hidup berdampingan dalam satu kota. Maka ketika kerusuhan terjadi dan salah satunya menyasar etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas, tentu saja hal tersebut menjadi sebuah anomali.

Pada dasarnya, tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia merdeka. Bahkan akar persekusi terhadap etnis minoritas sudah terjadi sejak masa kolonial. Dalam periode Indonesia merdeka, mereka mengalami pengusiran setelah diterapkannya PP 10 yang melarang etnis Tionghoa berbisnis di tingkat desa hingga kecamatan. Sepanjang periode Revolusi, orang-orang Tionghoa juga mendapatkan berbagai macam ancaman maupun serangan (Setiono, 2008). Etnis Tionghoa selalu dijadikan samsak atas berbagai macam amarah, kekecewaan, dan kekesalan massa. Akumulasi kemarahan yang awalnya mengarah pada pemerintah kemudian kerap dibelokkan menjadi konflik horizontal dengan persekusi terhadap kelompok Tionghoa.

Sebelum kemudian pecah menjadi kerusuhan anti rasial yang begitu besar, terutama di Jakarta pada 1998, berbagai aksi kekerasan yang menggunakan sentimen anti-Tionghoa telah terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi kekerasan berupa perusakan kelenteng maupun wihara tersebut terjadi antara lain di Purwakarta (31 Oktober-2 November 1995), Pekalongan (24 November 1995), Situbondo (10 Oktober 1996), Tasikmalaya (26 Desember 1996), Sanggau Ledo (30 Desember 1995-2 Januari 1996), Tanah Abang (28 Januari 1997), Rengasdengklok (27-31 Januari 1997), dan kemudian Banjarmasin pada 23 Mei 1997 (Salim & Achdian, 1997). Artinya, dalam periode ini berbagai kerusuhan yang terjadi di banyak kota kerap beriringan dengan isu anti-Tionghoa yang muncul ke permukaan.

Bertahan dan Pulih dari Krisis

Dalam setiap letusan besar sepanjang sejarah Indonesia, etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas kerap menjadi sasaran kebencian, kemarahan, maupun pelampiasan atas ketidakpuasan kelompok lain yang lebih dominan dari mereka. Sejak lama, terdapat cara pandang yang menganggap bahwa Tionghoa bukanlah kelompok etnis asli Indonesia. Pola permukiman yang dikelompokkan berdasarkan etnis di masa kolonial menjadikan orang Tionghoa terasing, tinggal secara ekslusif di dalam lingkungan kelompoknya saja oleh sebab pembatasan yang dilakukan sejak masa kolonial tersebut (Yen-Ling, 2011). Maka kemudian, terjadi kesenjangan dan jurang sosial yang menganga lebar antara masyarakat tempatan dengan etnis Tionghoa. Posisinya sebagai perantara dalam perekonomian menjadikan relasi antar etnis sebatas pada urusan transaksional semata. Hal inilah yang lama-kelamaan menjadi bom waktu berupa kekerasan yang kapanpun dapat meledak menjadi malapetaka, terutama sekali disebabkan stereotip yang dilekatkan pada mereka bahwa Tionghoa adalah “orang asing” di Indonesia (Chandra, 2012).

Termasuk dalam hal Peristiwa 23 Mei 1997 di Banjarmasin yang terjadi dalam situasi krisis politik dan ekonomi nasional jelang keruntuhan rezim Orde Baru, etnis Tionghoa juga tidak luput dari sasaran kemarahan (Khotimah, 2017). Meski pada mulanya kerusuhan ini dipicu oleh persinggungan antara massa partai politik dengan masyarakat umum, dalam hal ini umat Islam yang terganggu ibadahnya, namun kerusuhan akhirnya meluas dan menjadikan kelompok Tionghoa sebagai salah satu sasaran kemarahan.

Di tengah amukan massa yang membabi-buta, orang-orang Tionghoa pemilik toko kemudian menutup rapat-rapat pintu tempat usahanya tersebut. Sebagian besar mereka memilih bertahan di dalam toko yang biasanya terdapat lantai dua sebagai tempat perlindungan mereka. Sebagian lagi memutuskan menerobos kerumunan massa dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dua pilihan ini terutama untuk menyelamatkan diri mereka sendiri terlebih dahulu dari ancaman massa yang kalap. Terkait dengan jaminan keselamatan dan keamanan toko sudah bukan menjadi prioritas mereka lagi ketika kemarahan massa semakin memuncak.

Di tengah keadaan genting dan menegangkan seperti ini, beberapa pemilik toko lainnya yang bukan dari kalangan Tionghoa mencoba membantu sedapatnya. Mereka berinisiatif memasang tulisan “Allah” dan “Muhammad” di depan toko-toko maupun rumah milik orang Tionghoa. Hal ini dilakukan untuk mengelabui massa, supaya mereka mengira bahwa toko tersebut milik non Tionghoa sehingga mereka tidak akan melakukan perusakan maupun penjarahan (Husaini, 2023). Cara ini dapat disebut ampuh guna mencegah aksi penjarahan semakin meluas, sekaligus menekan angka perusakan terhadap pertokoan maupun permukiman milik orang Tionghoa, kendati tidak sedikit pula yang tetap jadi sasaran kemarahan dan pembakaran. Metode yang sama kemudian digunakan lagi ketika pecah berbagai peristiwa kerusuhan maupun penjarahan jelang Reformasi pada Mei 1998 (Ricklefs, 2022).

Dampak psikologis menjadi akibat nyata bagi etnis Tionghoa dari Peristiwa 23 Mei 1997 tersebut, selain juga kerugian ekonomi yang mesti mereka tanggung. Arif, salah seorang dari penyintas tersebut menuturkan bahwa setidaknya diperlukan waktu hingga dua bulan bagi kalangan Tionghoa untuk dapat pulih dari pengalaman traumatis sekaligus rasa takut yang melanda mereka pasca kerusuhan. Banyak dari mereka yang enggan untuk membuka toko tempat usaha mereka untuk sementara waktu. Bahkan dalam beberapa hari pasca kerusuhan, orang-orang Tionghoa memilih berdiam diri di rumah, sehingga untuk sekadar berbelanja kebutuhan pangan mereka juga harus meminta tolong kepada tetangga mereka yang non Tionghoa.

Beberapa orang Tionghoa yang mengalami kerugian secara materiil dan ekonomi kemudian memilih menutup permanen tokonya dan pindah ke kota lain. Sebagai kelompok pendatang, sebagian dari mereka kemudian memilih pulang kembali ke kampung halaman. Di antara mereka, ada yang kembali lagi ke Banjarmasin setelah situasi dianggap normal dan aman. Sisanya lagi tidak pernah kembali dan memilih melanjutkan kehidupan di tempat yang baru. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari cara mereka untuk membangun kembali usaha mereka yang telah dijalankan selama ini, kendati harus berpindah tempat seiring situasi pelik yang menimpa mereka. Apalagi jika mempertimbangkan situasi saat itu, Indonesia berada dalam tahun-tahun jelang puncak terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Artinya, daya beli berada dalam titik yang amat rendah, ditambah situasi politik dan sosial yang juga sedang sangat tidak stabil.

Peristiwa 23 Mei 1997 bukanlah akhir dari penderitaan yang dialami etnis Tionghoa yang kerap menjadi sasaran amuk dan kemarahan masyarakat yang sedang terjepit dalam krisis. Setahun berikutnya, kerusuhan dalam skala masif kembali terjadi. Namun kali ini kerusuhan bukan terjadi di Banjarmasin, melainkan di ibukota Jakarta. Sepanjang minggu-minggu jelang lengsernya Suharto dari jabatan presiden pada 21

Mei 1998, kerusuhan besar melanda Jakarta. Salah satu peristiwa yang paling mengerikan adalah penjarahan terhadap toko-toko milik orang Tionghoa, termasuk kemudian persekusi terhadap mereka (Sin, 2005). Puncak dari segala amukan ini adalah kekerasan seksual berupa perkosaan massal yang menyasar perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta.

Meski aksi kekerasan ini tidak sampai ke Banjarmasin, namun dampak psikologis dan potensi ancaman tentu saja menjalar ke kota-kota selain Jakarta, bahkan hingga di seberang Pulau Jawa tempat eskalasi kekerasan terjadi dengan amat masif. Sedapat mungkin orang-orang Tionghoa yang berada di luar Jakarta bersikap waspada apabila pola kekerasan serupa akan muncul di kota tempat tinggal mereka. Misalnya saja di Surakarta, Jawa Tengah banyak rumah-rumah maupun pertokoan milik orang Tionghoa yang memasang papan bertuliskan "milik pribumi" di gerbang rumah maupun pintu toko. Penanda ini digunakan sebagai cara agar rumah maupun toko mereka tidak dijadikan sasaran penjarahan dan amuk massa yang ketika itu sudah tidak dapat dibedakan lagi antara yang benar-benar massa demonstran atau para penjarah.

Pada dasarnya, Banjarmasin sejak permulaan abad ke-20 adalah kota yang amat jarang sekali mengalami kerusuhan atau kekerasan massal dengan intensitas dan skala yang masif. Terlebih lagi di masa Orde Baru, dapat disebut tidak ada aksi massa ataupun kerusuhan yang melanda kota tersebut (Salim & Achdian, 1997). Kota yang terletak di tepian Sungai Martapura ini relatif homogen, meski komunitas pendatang terdapat di beberapa titik di sekitar pusat kota. Sebagai kota dagang berbasis pelayaran sungai, tentu saja keamanan dan ketertiban menjadi sesuatu yang penting. Minimnya sektor industri menengah maupun besar juga efektif meredam urbanisasi besar-besaran dari luar kota sehingga kepadatan maupun kesenjangan di antara penduduk, utamanya yang berbeda etnis, nyaris tidak terjadi.

Dengan demikian, Peristiwa Jumat Kelabu yang di dalamnya termasuk penyerangan terhadap aset milik orang-orang Tionghoa ini dapat disebut sebagai sebuah anomali. Kota yang selama ini identik dengan keharmonisan dan nyaris selalu adem-ayem ini tiba-tiba diramaikan dengan sebuah peristiwa yang harus menelan ratusan korban jiwa serta kerusakan berat lainnya. Meski hingga kini nyaris belum ada hasil simpulan pasti mengenai apa yang sebetulnya terjadi dan siapa yang menjadi aktor intelektual dari peristiwa tersebut, yang jelas bahwa kejadian seperti ini bukanlah sesuatu yang lazim bagi masyarakat Banjarmasin. Maka kemudian ketika Orde Baru runtuh yang ditandai dengan berbagai demonstrasi besar, kerusuhan, penjarahan, bahkan hingga perkosaan massal seperti yang terjadi di Jakarta, hal tersebut tidak terjadi di Banjarmasin.

Kemungkinan besar, apa yang terjadi di Banjarmasin dalam Peristiwa 23 Mei 1997 mengandung unsur politik yang jauh lebih kuat daripada faktor lain seperti persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial. Meski bukan berarti tidak apa, namun faktor di luar persoalan politik praktis ini cenderung dapat direndam. Sehingga dengan demikian, kerusuhan maupun serangan terhadap etnis Tionghoa di Banjarmasin dapat diantisipasi terulang kembali saat berbagai kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia jelang Reformasi 1998. Meski pada kenyataannya, pada 1998 kekerasan anti-Tionghoa terjadi dengan amat masif terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya (Bertrand, 2008).

SIMPULAN

Pada akhirnya, meski harus mengalami serangkaian pengalaman yang traumatis dan mencekam, etnis Tionghoa di Banjarmasin dapat terus bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka pasca kerusuhan besar dalam Peristiwa 23 Mei 1997. Sebagai sebuah komunitas kecil, mereka berhasil membangun hubungan yang erat

dengan kelompok etnis lokal Banjarmasin sehingga saat kerusuhan terjadi, orang-orang Banjar banyak yang memberi perlindungan pada mereka. Walaupun kemudian tetap ada beberapa orang Tionghoa yang memilih pindah secara permanen dari Banjarmasin pasca kerusuhan, sebagian besar dari mereka yang bertahan berhasil membangun kembali usaha mereka yang luluh lantak pasca kerusuhan dan krisis. Terpaan krisis yang lebih berat lagi, terutama dalam hal krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada 1998 juga terbukti berhasil dilalui oleh orang-orang Tionghoa di Banjarmasin.

Simpulan dalam artikel ini menunjukkan bahwa dalam setiap kerusuhan yang dipicu persoalan krisis sosial dan ekonomi di Indonesia, orang Tionghoa kerap menjadi sasaran. Kendati seringkali tidak ada sangkut paut dengan awal mula pemicu konflik, etnis Tionghoa kerap menjadi sasaran, baik dalam hal penjarahan maupun persekusi. Kecemburuan sosial dan ekonomi yang seringkali tidak beralasan sering menjadi pemicu. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa sejak periode kolonial dan terutama setelah Indonesia merdeka, pola yang sama terus menerus berulang. Tidak hanya di Jawa maupun Sumatera, pola serupa juga terjadi di Kalimantan, dalam hal ini di Banjarmasin. Meski demikian, mereka dapat terus bertahan dan melewati krisis ini. Uraian dalam artikel ini kiranya dapat memantik penelitian serupa yang lebih mendalam yang dapat menganalisis lebih jauh sebab orang-orang Tionghoa dapat terus bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka meski harus hidup dalam bayang-bayang ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2006). *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertrand, J. (2008). Ethnic Conflicts in Indonesia: National Models, Critical Junctures, and the Timing of Violence. *Journal of East Asian Studies*, 425-449.
- Chandra, E. (2012). "We the (Chinese) People": Revisiting the 1945 Constitutional Debate about Citizenship. *Indonesia*, 85-110.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2012). *Kamus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Dharma, S. (2019, April 19). Etnis Tionghoa dan Peristiwa 23 Mei 1997. (Rahayu, Pewawancara)
- Firly, S. (2023). *Banjarmasin, Proyek, dan Cinta*. Dalam d. Mansyur, Tionghoa Banjar: Peran dan Kiprahnya dalam Lintasan Sejarah (hal. 468-471). Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Gurr, T. R. (2016). *Why Men Rebel*. New York: Routledge.
- Hendrata, S. (2024, January 24). *Etnis Tionghoa dan Peristiwa 23 Mei 1997*. (Rahayu, Pewawancara)
- Husaini. (2023, September 15). *Pedagang Pasar Sudimampir Saksi Peristiwa 23 Mei 1997*. (Rahayu, Pewawancara)
- Kampanye Pemilu '97 Cenderung Brutal. (1997, May 18). *Kompas*, hal. 13.
- Khotimah, H. (2017). Collective Memory "Jum'at Kelabu" di Banjarmasin (Perspektif Resolusi Konflik atas Peristiwa 23 Mei 1997). *Al-Banjari*, 235-276.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kusumabrata, A. (2024). What Remains of the 1998 Tragedy for the Post-1998 Generation. *Inside Indonesia*, 156 (Apr-Jun 2024).
- Nata, J. (2024, April 18). *Etnis Tionghoa dan Peristiwa 23 Mei 1997*. (Rahayu, Pewawancara)
- Oberschall, A. (1978). Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology*, 291-315.

- PDI dan PPP Habis-habisan: Lempari Rumah, Turunkan Atribut OPP Lain. (1997, May 23). Dinamika Berita, hal. 1.
- Pedagang Blauran Tidak Bisa Gelar Dagangan. (1997, May 26). Dinamika Berita.
- Penumpang Taksi Kota di Banjarmasin Anjlok sampai 50 Persen. (1997, May 28). Dinamika Berita.
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*. Singapore: NUS Press.
- Ravando. (2014). "Now is the Time Time to Kill All Chinese!": *Social Revolution and Massacre of Chinese in Tangerang, 1945-1946*. Leiden: Leiden University Library.
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Robinson, G. B. (2018). *The Killing Season: A History of Indonesian Massacres, 1965-1966*. Princeton: Princeton University Press.
- Salim, H., & Achdian, A. (1997). *Amuk Banjarmasin*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: TransMedia.
- Sin, S. K. (2005). Etnis Tionghoa Kristen Paska Kerusuhan Mei 1998. *Jurnal Theologia Alettheia*, 45-98.
- Soenarto. (2008). Banjarmasin Riot in 1997: A Political Violence of Election Campaign in South Kalimantan. *Borneo Research Journal*, Vol. 2.
- Suryadinata, L. (1976). Indonesian Policy toward the Chinese Minority under the New Order. *Asian Survey*, 770-787.
- Yen-Ling, T. (2011). Spaces of Exclusion, Walls of Intimacy: Rethinking "Chinese Exclusivity" in Indonesia. *Indonesia*, 122-155.
- Zhou, T. (2019). *Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War*. Ithaca: Cornell University Press.